

**PENGARUH PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO, PENDAPATAN
ASLI DAERAH, DANA ALOKASI UMUM DAN DANA ALOKASI KHUSUS
TERHADAP BELANJA DAERAH
(Studikases di Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2007-2013)**

Nur Harjiyanti

Abstract

The implementation of fiscal decentralization is to providing local government authority while give affect the region's ability to meet the public interest. This study aims to analyze the Gross Domestic Product (GDP), Original Income (PAD), General Allocation Fund (DAU) and Special Allocation Fund (DAK). The population in this study are 5 districts/regencies in Yogyakarta for period of 2007-2013. Multiple linear regression analysis was used to analyze the data.

The test result show that the General Allocation Fund (DAU) significantly affects on the allocation of regional expenditures, while Gross Domestic Product (GDP), General Allocation Fund (DAU) and Special Allocation Fund (DAK) do not significantly influence on the allocation of regional expenditures.

Keywords: Gross Domestic Product (GDP), Original Income (PAD), General Allocation Fund (DAU), Special Allocation Fund (DAK) and regional expenditures.

I. Latar Belakang Masalah

Reformasi sektor publik yang disertai adanya tuntutan demokratisasi menjadi suatu fenomena global termasuk di Indonesia. Tuntutan demokratisasi ini menyebabkan aspek transparansi dan akuntabilitas. Kedua aspek tersebut menjadi hal penting dalam pengelolaan pemerintah termasuk di bidang pengelolaan keuangan negara maupun daerah. Akuntabilitas publik adalah pemberian informasi dan pengungkapan seluruh aktivitas dan kerja finansial Pemerintah Daerah kepada pihak-pihak yang berkepentingan (Mardiasmo, 2010).

Tingkat pertumbuhan ekonomi menjadi salah satu tujuan penting pemerintah pusat maupun pemerintah

daerah. Pertumbuhan ekonomi mendorong pemerintah daerah untuk melakukan pembangunan ekonomi dengan mengelola sumber daya yang ada dan membentuk pola kemitraan dengan masyarakat. Pembangunan ekonomi ditandai dengan meningkatnya produktivitas dan pendapatan perkapita penduduk sehingga terjadi perbaikan kesejahteraan. Pertumbuhan ekonomi akan menciptakan lapangan pekerjaan baru yang akan mempengaruhi perkembangan kegiatan ekonomi dalam daerah (Kuncoro, 2004).

Asas kemandirian dalam pengelolaan anggaran dijadikan dasar pemerintah daerah untuk mengoptimalkan penerimaan dari daerahnya sendiri yaitu sektor

Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pendapatan asli daerah merupakan sumber penerimaan pemerintah daerah yang berasal dari daerah itu sendiri berdasarkan kemampuan yang dimiliki. Pendapatan asli daerah terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan yang sah (Kawedar, 2008).

Otonomi daerah menuntut pemerintah daerah untuk lebih mandiri, tidak terkecuali mandiri dalam masalah *financial*. Meski begitu Pemerintah Pusat tetap memberi dana bantuan yang berupa Dana Alokasi Umum (DAU) yang di transfer ke pemerintah daerah. Transfer dari pemerintah pusat merupakan sumber pendanaan utama pemerintah daerah untuk membiayai operasional daerah, yang oleh pemerintah daerah "dilaporkan" di perhitungan anggaran. Tujuan dari transfer ini adalah untuk mengurangi kesenjangan fiskal antar pemerintah dan menjamin tercapainya standar pelayanan publik minimum di seluruh negeri (Maimunah, 2006).

Berdasarkan Undang-undang No.33 Tahun 2004, dana alokasi khusus merupakan dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional. Dana Alokasi Khusus ini penggunaannya diatur oleh pemerintah pusat dan hanya digunakan untuk kegiatan pendidikan, kesehatan, keluarga berencana, infrastruktur jalan dan jembatan, infrastruktur irigasi, infrastruktur air minum dan sanitasi, prasarana pemerintah daerah, lingkungan hidup, kehutanan, sarana prasarana

pedesaan, perdagangan, pertanian sertaperikanan dan kelautan. Kegiatan tersebut mengalokasikan dana pendampingan sebesar 10% dari nilai DAK yang diterimanya untuk mendanai kegiatan fisik (Putro, 2010).

Menurut Mardiasmo (2002) saat ini masih banyak masalah yang dihadapi pemerintah daerah terkait dengan upaya meningkatkan penerimaan daerah. Belanja daerah dipergunakan dalam rangka mendanai pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenang Provinsi atau Kabupaten/Kota. Urusan pemerintah terdiri dari urusan wajib, urusan pilihan dan urusan yang penanganannya dalam bidang tertentu yang dapat dilaksanakan bersama antara pemerintah dan pemerintah daerah atau antar pemerintah daerah yang ditetapkan dengan ketentuan perundang-undangan.

Pada dasarnya penelitian ini mereplikasi dari penelitian Darwanto dan Yulia Yustikasari (2007) dengan obyek dan waktu yang berbeda. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian Darwanto dan Yulia Yustikasari (2007) Penelitian ini berusaha untuk mengetahui apakah produk domestik regional bruto, pendapatan asli daerah, dana alokasi umum, dan dana alokasi khusus berpengaruh terhadap belanja daerah.

II. Landasan Teori dan Hipotesis

1. Pengaruh Produk Domestik Regional Bruto terhadap Belanja Daerah

Kebijakan otonomi daerah merupakan kewenangan yang diberikan kepada pemerintah daerah untuk

mengatur dan mengurus tiap-tiap daerah. Hal ini mendorong pemerintah daerah untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat. Namun kemampuan daerah yang satu dengan daerah yang lainnya dalam mengolah potensi lokal dan ketersediaan sarana prasarana serta sumber daya berbeda. Perbedaan ini menyebabkan pertumbuhan ekonomi yang beragam antara satu daerah dengan daerah lainnya (Putro, 2009). Berdasarkan landasan teori diatas dapat disimpulkan bahwa dengan adanya kebijakan otonomi daerah akan mendorong terciptanya pertumbuhan ekonomi suatu daerah. Oleh karena itu hipotesis pertama dinyatakan sebagai berikut:

H1: Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) berpengaruh positif terhadap Belanja Daerah.

2. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Daerah

Pendapatan asli daerah berpengaruh positif terhadap alokasi belanja daerah pemerintah daerah yang memiliki PAD tinggi maka pengeluaran untuk alokasi belanja daerahnya juga semakin tinggi (Rahmawati, 2010). Semakin banyak pendapatan asli daerah yang didapat semakin memungkinkan daerah tersebut untuk memenuhi kebutuhan belanjanya sendiri, tanpa harus tergantung pada pemerintah pusat. Hipotesis berikutnya adalah sebagai berikut:

H2: Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh positif terhadap Belanja Daerah.

3. Pengaruh Dana Alokasi Umum terhadap Belanja Daerah

Penelitian yang dilakukan oleh Darwanto dan Yustikasari (2007) dan Putro (2009), menunjukkan hasil bahwa variabel dana alokasi umum berpengaruh secara signifikan terhadap variabel belanja modal. Hal ini disebabkan karena dengan adanya transfer DAU dari pemerintah pusat maka pemerintah daerah bisa mengalokasikan pendapatannya untuk membiayai belanja modal. Hasil penelitian Harianto dan Adi (2007) semakin memperkuat bukti empiris tersebut. Mereka menemukan bahwa kemandirian daerah tidak menjadi lebih baik, bahkan yang terjadi adalah sebaliknya yaitu ketergantungan pemerintah daerah terhadap transfer dana alokasi umum menjadi semakin tinggi. Hipotesis berikutnya adalah sebagai berikut:

H3: Dana Alokasi Umum berpengaruh positif terhadap Belanja Daerah

4. Pengaruh Dana Alokasi Khusus terhadap Belanja Daerah

Latifah (2010) membuktikan bahwa dana alokasi khusus digunakan untuk menutup kesenjangan pelayanan publik antar daerah dengan memberi prioritas pada bidang pendidikan, kesehatan, infrastruktur, kelautan dan perikanan, pertanian, prasarana pemerintahan daerah, dan lingkungan hidup. Penelitian yang dilakukan oleh Situngkir (2009), membuktikan bahwa dana alokasi khusus berpengaruh positif dan signifikan terhadap anggaran belanja modal. Berdasarkan landasan teori dan penemuan empiris tersebut, maka menghasilkan hipotesis sebagai berikut:

H4: Dana Alokasi Khusus (DAK) berpengaruh positif terhadap Belanja Daerah

III. Hasil Analisis Data dan Pembahasan

Uji asumsi klasik yang dilakukan dalam penelitian ini meliputi uji normalitas, uji multikolinearitas, uji heteroskedasitas.

Uji Hipotesis

Hipotesis 1, pada output regresi menunjukkan bahwa angka signifikansi untuk variabel Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) sebesar 0,222. Nilai ini lebih besar dari tingkat signifikansi sebesar 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa Produk Domestik Regional Bruto secara individual tidak berpengaruh signifikan terhadap belanja daerah.

Hipotesis 2, pada output regresi menunjukkan bahwa angka signifikansi untuk variabel Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar 0,155. Nilai ini lebih besar dari tingkat signifikansi sebesar 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa Pendaptan Asli Daerah secara individual tidak berpengaruh signifikan terhadap belanja daerah.

Hipotesis 3, pada output regresi menunjukkan bahwa angka signifikansi untuk variabel Dana Alokasi Umum (DAU) sebesar 0,005. Nilai ini lebih kecil dari tingkat signifikansi sebesar 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa Dana Alokasi Umum berpengaruh secara individual mempengaruhi belanja daerah, dan dapat disimpulkan hipotesis diterima.

Hipotesis 4, pada output regresi menunjukkan bahwa angka signifikansi untuk variabel Dana Alokasi Khusus (DAK) sebesar 0,836. Nilai ini lebih

besar dari tingkat signifikansi sebesar 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa Dana Alokasi Khusus secara individual tidak berpengaruh signifikan terhadap belanja daerah.

Tabel 2. Analisis Regresi Linier Berganda

Model	Variabel	B	Sig
1	PDRB	0,223	0,222
	PAD	-0,387	0,155
	DAU	0,639	0,005
	DAK	-0,049	0,836
F.Hitung			: 5,179
0,003			
Adjusted Square			: 0,330

Sumber: Data sekunder diolah 2015

$$BD = 16.664,787 + 0,001PDRB - 0,242PAD + 0,220DAU - 0,121DAK$$

Pembahasan

Hipotesis pertama menyatakan bahwa "Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) berpengaruh positif terhadap Alokasi Belanja Daerah". Hasil penelitian ini mendapatkan bahwa PDRB berarah positif namun tidak berpengaruh signifikan terhadap belanja daerah. PDRB yang besar akan cenderung memiliki belanja modal besar. Pemberian otonomi yang lebih besar akan memberikan dampak yang lebih besar bagi pertumbuhan ekonomi. Semakin tinggi tingkat pertumbuhan ekonomi akan mengakibatkan pertumbuhan investasi modal swasta maupun daerah. Beberapa kabupaten/kota dengan pendapatan daerah dan PDRB yang besar memiliki pengeluaran daerah yang besar pula. Hasil penelitian ini berbeda dengan

penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Darwanto dan Yulia Yustikasari (2007), yang menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif terhadap alokasi belanja modal.

Hipotesis kedua menyatakan bahwa "Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh positif terhadap Alokasi Belanja Daerah". Hasil penelitian ini mendapatkan bahwa PAD berarah negatif dan tidak berpengaruh signifikan terhadap belanja daerah. Mardiasmo (2002), menyatakan pendapatan asli daerah adalah penerimaan daerah dari sektor pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Semakin kecil pendapatan daerah yang diterima, maka semakin kecil pula kewenangan pemerintah daerah tersebut dalam melaksanakan kebijakan otonom. Hasil ini sejalan dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Putro (2009), menyatakan bahwa variabel PAD tidak berpengaruh terhadap alokasi belanja modal, karena PAD lebih banyak digunakan untuk membiayai belanja pegawai dan biaya langsung lainnya daripada untuk membiayai belanja modal.

Hipotesis ketiga menyatakan bahwa "Dana Alokasi Umum (DAU) berpengaruh positif terhadap Alokasi Belanja Daerah". Hasil pengujian statistik menunjukkan bahwa Dana Alokasi Umum (DAU) signifikan. Sesuai dengan hasil penelitian, maka semakin tinggi Dana Alokasi Umum yang diperoleh Pemerintah Daerah dari Pemerintah Pusat, maka akan semakin tinggi pula alokasi belanja daerah. Hasil

ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Darwanto dan Yulia Yustikasari (2007) serta Putro (2009), yang menyatakan bahwa variabel DAU berpengaruh terhadap alokasi belanja modal, karena adanya dana transfer DAU dari pemerintah pusat maka pemerintah daerah bisa mengalokasikan pendapatannya untuk membiayai belanja modal/daerah.

Hipotesis keempat menyatakan bahwa "Dana Alokasi Khusus (DAK) berpengaruh positif terhadap Alokasi Belanja Daerah". Hasil penelitian ini mendapatkan bahwa DAK berarah negatif dan tidak signifikan terhadap belanja daerah. Dana alokasi khusus dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional, khususnya dalam upaya pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana pelayanan dasar masyarakat. Hasil penelitian ini berbeda dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Situngkir (2009), yang menyatakan bahwa DAK berpengaruh positif dan signifikan terhadap alokasi belanja modal.

IV. Kesimpulan, Implikasi dan Saran

Kesimpulan

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) tidak berpengaruh signifikan terhadap belanja daerah. Hal ini dapat disebabkan oleh pertumbuhan ekonomi yang diproksi dengan PDRB mengalami peningkatan tetapi anggaran belanja daerah mengalami penurunan. Pendapatan Asli Daerah (PAD) tidak berpengaruh signifikan terhadap belanja daerah. Apabila PAD lebih banyak

digunakan untuk membiayai belanja pegawai dan biaya langsung lainnya, maka pemerintah daerah hanya mengandalkan transfer dana dari pemerintah pusat untuk membiayai belanja daerah. Dana Alokasi Umum (DAU) berpengaruh signifikan terhadap belanja daerah. Berkaitan dengan perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah, terjadi transfer yang cukup signifikan di dalam APBD dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah dan pemerintah daerah dapat memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat. Dana Alokasi Khusus (DAK) tidak berpengaruh signifikan terhadap belanja daerah. Hal ini dapat disebabkan karena besarnya DAK relatif lebih kecil apabila dibandingkan dengan dana perimbangan lainnya. Jumlah transfer dapat menyebabkan penurunan dalam pengeluaran anggaran belanja daerah.

Implikasi

Bagi penulis memberikan bukti empiris mengenai pengaruh Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) terhadap Belanja Daerah pada Kabupaten/Kota di Daerah Istimewa Yogyakarta. Bagi pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah kota dalam hal penyusunan kebijakan dimasa datang yang berkaitan dengan perencanaan, pengendalian dan evaluasi dari Badan Pusat Statistik. Bagi peneliti lain sebagai bahan referensi dan data bagi yang tertarik dalam bidang kajian ini.

Saran

Bagi peneliti berikutnya dimasa mendatang disarankan agar memperluas memperluas atau memperbanyak sampel penelitian, seperti sampel dari luar Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dengan menambah jumlah pengamatan, agar hasilnya lebih representatif terhadap populasi yang dipilih. Variabel yang digunakan dalam penelitian akan datang diharapkan lebih lengkap dan bervariasi dengan menambah variabel independen lain baik ukuran-ukuran atau jenis-jenis penerimaan pemerintah daerah lainnya, maupun variabel non-keuangan seperti kebijakan pemerintah, kondisi makro-ekonomi.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Syukriy & Abdul Halim. 2004. "Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Belanja Pemerintah Daerah; Studi Kasus pada Kabupaten/Kota di Jawa-Bali". Yogyakarta: *Jurnal Simposium Nasional Akuntansi (SNA) VI*, Surabaya 16-17 Oktober 2003.
- Bastian, Indra. 2012. *Sistem Akuntansi Sektor Publik*. Penerbit Salemba 4: Jakarta.
- Brahmantio, Isdijoso. 2002. "Analisis Kebijakan Fiskal Pada Era Otonomi Daerah" (*Studi Kasus: Sektor Pendidikan di Kota Surakarta*), Kajian Ekonomi Dan Keuangan Vol. 6 No. 1.
- Darwanto dan Yustikasari, Yulia. 2007. "Pengaruh pertumbuhan ekonomi, Pendapatan Asli

- Daerah, dan Dana Alokasi Umum terhadap pengalokasian anggaran belanja modal”, *Seminar Nasional Akuntansi*. Makassar, 26-28 Juli 2007.
- Ghozali, Imam. 2006. *Aplikasi Analisis Multivariat Dengan Program SPSS*. Edisi 4. Badan Penerbitan Universitas Diponegoro: Semarang.
- Halim, Abdul. 2007. “*Akuntansi Sektor Publik : Akuntansi Keuangan Daerah*”. Edisi 3. Salemba 4 : Jakarta.
- Halim, Abdul. 2009. “*Problem Desentralisasi dan Perimbangan Keuangan Pemerintahan Pusat-Daerah*”. Yogyakarta: Sekolah Pascasarjana UGM.
- Harianto, David dan Adi Priyo Hadi. 2007. “Hubungan Antara Dana Alokasi Umum, Belanja Modal, Pendapatan Asli Daerah dan Pendapatan Per Kapita”. *Simposium Nasional Akuntansi x*, Makasar.
- Kawedar Warsito, dkk .2008. “*Akuntansi Sektor Publik*”.
- Kuncoro, Mudrajat. 2004. *Otonomi dan Pembangunan Daerah: Reformasi, Perencanaan, Strategi dan Peluang*. Penerbit Erlangga. Jakarta.
- Kuncoro, Mudrajad. 2009. *Metode Riset Untuk Bisnis dan Ekonomi*. Jakarta : Erlangga.
- Latifah, Rosyida. 2010. “Hubungan Aantara Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Belanja Modal, Pendapatan Asli Daerah dan Pendapatan Perkapita”. *Skripsi*. Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
- Maimunah, Mutiara. (2006). “Flypaper Effect pada Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Belanja Daerah pada Kabupaten/Kota di Pulau Sumatera”. *Simposium Nasional Akuntansi IX*. Padang.
- Mardiasmo. 2010. *Otonomi dan Manajemen keuangan daerah*. Penerbit Andi: Yogyakarta.
- Mardiasmo. 2004. *Akuntansi Sektor Publik*. Penerbit Andi: Yogyakarta.
- Prakosa, Kesit Bambang. 2004. “Analisis Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pendapatan Asli Darah (PAD) terhadap Prediksi Belanja Daerah” (Studi Empirik di Wilayah Propinsi Jawa Tengah dan DIY), *JAAI*, Vol. 8 No. 2.
- Pratiwi, Maulida. 2007. “Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Prediksi Belanja Daerah”. *Tesis S-2* Yogyakarta : Universitas Islam Indonesia.
- Putro, Nugroho Suratno. 2010 “Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum

- Terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal (Studi Kasus Pada Kabupaten/Kota Di Provinsi Jawa Tengah)". *Skripsi*. Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro, Semarang.
- Putro, Nugroho Suratno (2009). "Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah dan Dana alokasi Umum Terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal (Study Kasus pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah Periode 2006-2008)". *Jurnal Ilmiah*. Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro.
- Rahmawati, Nur Indah. 2010. "Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Alokasi Umum (DAU) Terhadap Alokasi Belanja Daerah", *Skripsi*, UNDIP, Semarang.
- Saragih, Panglima Juli. 2003. *Desentralisasi Fiskal dan Keuangan Daerah dalam Otonomi*, Penerbit Ghalia Indonesia: Jakarta.
- Sekaran, Uma. 2009. *Research Methods For Business (Metodologi Penelitian untuk Bisnis)*. Jakarta: Salemba Empat.
- Setyowati, Lilis. 2012. "Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, dan Pendapatan Asli Daerah terhadap Indeks Pembangunan Manusia dengan Pengalokasian Anggaran Belanja Modal sebagai Variabel-variabel". *Jurnal Prestasi*, Vol. 9 No. 1.
- Sidik, Machfud. 2002. "Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah Sebagai Pelaksanaan Desentralisasi Fiskal". *Makalah Seminar Setahun Implementasi, Kebijaksanaan Otonomi Daerah di Indonesia*, Yogyakarta, 13 Maret 2002.
- Situngkir, Anggiat. 2009. "Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus terhadap Alokasi Belanja Modal Daerah Kabupaten dan Kota se-Jawa Tengah". *Tesis*. Universitas Sumatera Utara. Medan.
- Sukirno, Sadono. 2010. " *Teori Pengantar Makroekonomi*. Penerbit Raja Grafindo Persada: Jakarta.
- www.diy.bps.go.id
- www.djpk.depkeu.go.id
- _____. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang *Pemerintahan Daerah*
- _____. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang *Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah*.

_____, Undang-Undang
Nomor 34 Tahun 2004 tentang
*Perubahan Undang-Undang tentang
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.*

_____. PP Nomor 55
Tahun 2005 tentang *Dana Perimbangan.*

_____. PP Nomor 58
Tahun 2005 tentang *Pengelolaan
Keuangan Daerah.*

_____. PP Nomor 66
Tahun 2002 tentang *Retribusi Daerah.*

_____. PP Nomor 71
Tahun 2010 tentang *Standar Akuntansi
Pemerintah.*

_____. Pemendagri Nomor
13 Tahun 2006 tentang *Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah.*

_____. Pemendagri Nomor
21 Tahun 2011 tentang *Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah.*